

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Austin, Reginal & Maja Tjernstorm (ed). 2003. *Funding of Political Parties and Electoral Campaign*. Stockholm: IDEA International.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dye, Thomas dalam Wayne Parsons. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, William N. “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*”, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif ; Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3 Malang.
- Falguera, Elin. 2014. *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Party Finance*. Stockholm: IDEA International.
- Galston, William. A. dalam Moran, Michael., Martin Rein, dan Robert E. Goodin (ed). 2015. *Handbook Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Global Commission on Elections, Democracy & Security. 2012. *Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia*, Stockholm: IDEA International & Kofi Annan Foundation.
- Harun, Refly. 2016. *Pemilu Konstitusional, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- IDEA International. 2004. *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Jakarta: IDEA International.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Moleong, Lexy J. 2004 (Edisi Revisi). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2017 (Edisi Revisi). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ohman, Magnus (ed). 2013. *Pedoman Pengawasan Keuangan Politik*. Washington: International Foundation for Electoral System (IFES).
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Siswadi, Edi. 2012. *Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Efektif dan Prima*. Bandung: Mutiara Press.
- Subarsono, A.G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Serial Demokrasi Elektoral Edisi 10*. Jakarta: Kemitraan.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul, 1991. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta.

TESIS, JURNAL DAN LAPORAN RISET

- Budiawan, Eka. 2016. “Sosialisasi Politik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara”. Tesis Program Studi Pengembangan Sumberdaya Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Djani, Luky, dkk. 2013. Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye. Laporan Riset Institute Strategic Initiatives (ISI).
- Duschinsky, Michael Pinto. 2002. Financing Politics: A Global View. *Journal of Democracy*. Volume 13, Number 4 October. Hlm. 69-86.

- Firdaus, 2013. Parade Iklan Politik di Tahun Politik: Polarisasi Penggunaan Iklan Untuk Mem bangun Citra Menuju Pemilu 2014. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Imam Bonjol. Vol 1 Issue 1 . Hlm. 81-94.
- FITRA Riau – ICW. 2015. Potret Pengelolaan Keuangan Partai Politik Riau – Hasil Investigasi dan Akses Informasi Publik.
- Husodo, Adnan Topan. 2012. Pengaturan Dana Kampanye dan Implikasinya terhadap Praktek korupsi Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Yayasan Perludem, Volume 3, Edisi Mei. Hlm. 27-54.
- Kelompok Kerja Reformasi Pendanaan Parpol dan Kampanye. 2012. Reformasi Sistem Pendanaan Parpol dan Kampanye di Indonesia. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Yayasan Perludem Vol. 3 Edisi Mei. Hlm. 131-148.
- KPU Provinsi Sumatera Barat. 2015. Laporan Akhir Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
- McConnell, Alan. 2010. Policy Success, Policy Failure and Grey Area in-Between. *International Journal of Public Policies*. Cambridge University Press. Vol. 30 No. 3. Hlm. 345-362.
- Meyer, Kenneth R. 2013. Public Election Funding: An Assesment of What We Would Like to Know. *The Forum, Journal in Contemporary Politics*. Vol. 11 Issue No. 3. Hlm. 365-384.
- Nofrita, Efri. 2018. “Politik Anggaran Pilkada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015”. Tesis Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP Universitas Andalas, Padang.
- Novita, Ira. 2017. “Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Dana Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Sumatera Barat”. Tesis Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu FISIP Universitas Andalas, Padang.
- Perludem, Yayasan. 2016 Evaluasi Pilkada Serentak 2015. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. No. 8 Edisi April 2016. Hlm. iv.
- Tim Puslitbangwas BPKP. 2016. Laporan penelitian “Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi”. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Sadikin, Usep Hasan. 2016. Menyerentakkan Pemilu, Memusatkan Anggaran Pilkada. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Yayasan Perludem Vol. 8 Edisi April. Hlm. 21-42.
- Van Biezen, Ingried. 2003. Financing Political Parties and Election Campaigns – Guidelines, dalam *Integrated Project “Making Democratic Institutions Work”*. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing.

----- 2004. Political Parties as Public Utilities. *Party Politics*, Volume 10, No. 6. Hlm. 701-722.

Webber, David J., 2005. Analyzing Political Feasibility: Political Scientist Unique Contribution to Policy Analysis. *Policy Studies Journal*, Vol. 14. Hlm. 545-553.

WEBSITE

<http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/21114211/Mendagri.343.Kepala.Da%20erah.Tersangkut.Kasus.Hukum>, diakses terakhir 15 Februari 2018.

<http://rumahpemilu.org/yenny-soetjipto-fiskal-daerah-terbatas-pilkada-harus-dari-apbn/>, diakses terakhir 18 Desember 2017.

<http://www.beritasatu.com/aktual/307575-kampanye-calon-dibiayai-negara-bukti-parpol-ingin-enaknya-saja>, diakses terakhir 20 Januari 2018.

<https://news.okezone.com/read/2017/05/29/337/1702184/pengamat-apbn-bisa-bangkrut-kalau-semua-kampanye-saksi-parpol-dibiayai-negara> diakses terakhir 20 Januari 2018.

<http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2015/09/14/342399/uji-materi-uu-pilkada-tolak-negara-danai-kampanye-calon-kepala-daerah>. Diakses terakhir 20 Januari 2018.

<https://www.viva.co.id/berita/politik/243035-kampanye-semua-parpol-harus-dibiayai-negara> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2018

<https://nasional.tempo.co/read/398826/marzuki-alie-usul-dana-kampanye-ditanggung-negara> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2018

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/11/08/25/-apbn-kita-kuat-kok-menanggung-biaya-kampanye-partai> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2018

<https://news.okezone.com/read/2011/08/25/339/496283/kampanye-dibiayai-apbn-biar-parpol-mikir> diakses terakhir pada tanggal 2 Juni 2018

www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/27/pcizj3409-ini-daftar-20-kepala-daerah-tersangka-korupsi-di-kpk diakses terakhir pada tanggal 29 Juli 2018

www.nasional.tempo.co/read/1060946/8-kepala-daerah-yang-diduga-korupsi-untuk-modal-pilkada diakses terakhir pada tanggal 29 Juli 2018

UNDANG-UNDANG, PERATURAN, PUTUSAN DAN DOKUMEN LAIN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XIII/2015.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2015

